



PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PPID PEMBANTU KOTA MADIUN

2021

 ppid.madiunkota.go.id

 [ppidkotamadiun](https://www.instagram.com/ppidkotamadiun)

 (0351) 467327

 ppidkotamadiun@gmail.com

 Jln. Perintis Kemerdekaan No. 32, Madiun

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenaanannya maka Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Semangat keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan mampu mendorong badan publik maupun unit pelayanan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan.

Melalui laporan evaluasi PPID ini diharapkan dapat melihat tingkat keterbukaan informasi publik pada masing-masing PPID Pembantu baik tingkat OPD/kecamatan, kelurahan maupun BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.

PPID Kota Madiun diminta secara aktif menggunakan berbagai macam kanal/ media informasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam menyampaikan pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan Monev pada tahun 2021 ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yang mana pelaksanaannya masih dalam situasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan Monev tahun 2021 hanya dilakukan ke beberapa PPID Pembantu pilihan. Tim Monev dan Evaluasi PPID Pembantu terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 1 (satu) orang pranata humas serta 1 (satu) orang petugas PPID Utama Kota Madiun.

Kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021, sehingga saran dan masukan untuk penyempurnaan yang akan datang tetap kami harapkan. Semoga Laporan ini dapat berguna dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 198803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
Sarana dan Prasarana PPID Kota Madiun.....	2
Pelayanan Informasi Publik.....	2
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID.....	3
II. Tujuan.....	4
III. Ruang Lingkup.....	4
BAB II : PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI	
Evaluasi website pengisian SAQ.....	8
Hasil Tangkapan Layar PPID Pembantu.....	15
BAB III : KESIMPULAN	
Kepatuhan Pengisian SAQ.....	25
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.....	27
BAB IV : LAMPIRAN FOTO KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kepatuhan Pengisian SAQ OPD.....	25
Tabel 2 : Kepatuhan Pengisian SAQ Kelurahan	26
Tabel 3 : Tingkat Kepatuhan Keterbukaan Informasi Publik	27

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan itu pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang – Undang KIP dan wujud pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*), Pemerintah Kota Madiun sebagai badan publik dalam pelaksanaan penyediaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat menetapkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Peraturan Walikota ini sebagai dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun.

PPID Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut terdiri dari PPID Kota Madiun (Utama) yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan dibantu oleh 64 PPID Pembantu baik itu OPD, BUMD, Kecamatan maupun Kelurahan. Pembentukan PPID Kota Madiun ini juga sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

SARANA DAN PRASARANA PPID KOTA MADIUN

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pemerintah Kota Madiun telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari: Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain:

- a. Kursi tamu dan kursi tunggu;
- b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi (Meja Desk Informasi);
- c. Ruang Konsultasi PPID;
- d. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
- e. 1 (satu) unit telepon dan 1 (satu) unit printer;
- f. 3 (tiga) lemari arsip.

Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan dengan;

- Datang langsung ke meja layanan informasi;
- Telepon/fax (0351) 467327;
- Email ppidkotamadiun@gmail.com
- Portal/website PPID yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <http://ppid.madiunkota.go.id>.

Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kota Madiun (PPID Utama) maupun PPID pada perangkat daerah (PPID Pembantu).

Sebagai bentuk koordinasi PPID Kota Madiun kepada PPID Pembantu dalam memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik maka secara rutin dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada PPID Pembantu. Dimana tujuan pelaksanaan Monev yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pembantu.

Pelaksanaan Monev PPID

Pelaksanaan Monev PPID Pembantu Tahun 2021 ini dilaksanakan melalui pengisian lembar SAQ (*Self Assesment Questionniare*) untuk mengetahui kelengkapan website PPID Pembantu, kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta kendala atau permasalahan apa yang dihadapi oleh PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya untuk menyediakan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang – Undang KIP.

Pada tahun 2021 ini, dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19, maka PPID Utama Kota Madiun melakukan hanya sekali monitoring dan evaluasi (Monev) PPID Pembantu. Proses pelaksanaannya pada tahun 2021 dilaksanakan terlebih dahulu *launching* atau bimbingan oleh PPID Utama dengan melaksanakan *virtual meeting* via zoom dengan PPID Pembantu untuk mengevaluasi kelengkapan pada tahun sebelumnya, serta pembagian lembar SAQ.

Tujuan pengisian SAQ tersebut adalah agar PPID Pembantu dapat mengetahui informasi dan dokumentasi publik apa saja yang wajib disediakan, sehingga secara tidak langsung akan berusaha untuk memenuhi permohonan informasi publik yang ada di SAQ.

Selain itu dilakukan visitasi untuk melihat atau kroscek di lapangan dari hasil pengisian SAQ dan mengetahui permasalahan di PPID Pembantu dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Masih sama dengan tahun kemarin, visitasi hanya dilaksanakan pada PPID Pembantu terbaik dan 5 terendah yang masuk berdasarkan pengisian kuisisioner yang telah dikirimkan oleh masing-masing PPID Pembantu.

Monev tahun 2021 juga mengevaluasi hasil dari pelatihan-pelatihan admin PPID Pembantu, apakah admin dari PPID Pembantu sudah menerapkan atau mengaplikasikan di masing-masing konten website atau belum sekaligus melihat inovasi – inovasi apa yang diciptakan oleh PPID Pembantu dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

Tim visitasi juga memberikan saran, masukan serta menyampaikan hal – hal apa sekiranya dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya melalui website PPID serta bagaimana sikap dalam menjawab permohonan informasi publik yang bersifat sensitif agar tidak terjadi sengketa informasi dikemudian hari. PPID Utama dengan tangan terbuka akan membantu memfasilitasi jika terjadi permohonan informasi yang bersifat sensitif tersebut.

Sehingga dengan adanya Monev PPID Pembantu ini dapat diketahui sampai sejauh mana keseriusan di unit PPID pembantu dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi. Dan nantinya diharapkan PPID Kota Madiun dapat terus meningkatkan pelayanan penyediaan informasi dan dokumentasi publik yang menjadi indikator tingkat keterbukaan informasi publik di Kota Madiun khususnya.

II. Tujuan

Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021 ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui sampai sejauh mana pemahaman PPID Pembantu mengenai informasi publik yang wajib disediakan serta klasifikasi terhadap informasi.
2. Mengetahui kelengkapan isi/konten website PPID Pembantu.
3. Mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pembantu dalam mengelola websitenya.
4. Untuk mencari saran dan masukan dari PPID Pembantu mengenai apa saja yang bisa dilaksanakan oleh PPID Utama sebagai bagian koordinasi dalam peningkatan pelayanan informasi publik.
5. Mengetahui penerapan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu, khususnya jika ada permohonan informasi yang bersifat sensitif.
6. Penguatan data melalui website PPID Pembantu sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Madiun dalam merespon dan menindaklanjuti perubahan era memasuki era industri 4.0.
7. Pemantauan dan koordinasi yang intensif antara PPID Utama dan PPID Pembantu Kota Madiun.

III. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Website PPID Pembantu ini mencakup dua sub kegiatan yakni monitoring dan evaluasi yang secara rinci uraian kegiatannya meliputi :

1. Monitoring

Monitoring untuk melihat kelengkapan website PPID Pembantu yang terdiri

- Profil OPD
- Visi dan Misi
- Tugas dan Fungsi
- Bagan Struktur OPD

- Nama Pejabat Struktural
- Program / Kegiatan dan Anggaran
- Data Pegawai
- Berita
- Produk Hukum
- Layanan Publik
- Struktur PPID
- Daftar Informasi Publik
 - a. Informasi serta merta
 - b. Informasi setiap saat
 - c. Informasi berkala
 - d. Informasi yang dikecualikan
- Aspirasi dan Pengaduan
- Laporan akses informasi publik
- Kontak PPID
- Tampilan Website
- Kemudahan navigasi
- Transparansi anggaran, khususnya terkait bantuan covid-19 sesuai dengan amanat dan peraturan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020

2. Visitasi langsung ke PPID Pembantu

Tujuan visitasi yakni untuk mengetahui data – data sebagai berikut :

- 1) Permasalahan yang ada di masing – masing PPID Pembantu;
- 2) Saran, masukan dan pelatihan apa saja yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan SDM dari admin PPID Pembantu;
- 3) Sarana dan prasarana pelayanan PPID di tingkat PPID Pembantu.

3. Evaluasi

Sedangkan evaluasi mencakup:

- Kendala/permasalahan teknis pengisian website;
- Kendala/permasalahan pengisian konten berita kegiatan;
- Kendala/permasalahan pengklasifikasian informasi;
- Kendala/permasalahan transparansi anggaran;
- Kendala/permasalahan pemahaman tupoksi PPID;

- Kendala/permasalahan penggunaan TIK dalam mengoperasikan website PPID Pembantu termasuk optimalisasi tampilan website;
- SDM dari pengelola PPID Pembantu.
- Kendala dalam pemberian Informasi Publik ke masyarakat

BAB II

PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Monev PPID Pembantu Tahun 2021, Tim monev PPID Kota Madiun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di masing – masing unit PPID Pembantu. Evaluasi ini dilakukan ke PPID Pembantu dengan rincian PPID Pembantu OPD sebanyak 5 terbaik dan 5 terendah, serta PPID Pembantu Kelurahan 5 terbaik dan 5 terendah.

Sedangkan apa saja yang dievaluasi yakni meliputi kelengkapan website, keterbukaan penyajian informasi, kemudahan dalam menemukan kategori yang diinginkan, update terhadap informasi kegiatan di masing – masing PPID Pembantu serta bagaimana tampilan penyajian informasi di website.

Pelaksanaan Monev dimulai dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis secara daring kepada PPID Pembantu. Bimtek memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada PPID Pembantu mengenai pelaksanaan Monev PPID Pembantu Tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada Monev tahun ini PPID Pembantu harus mengisi SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) dan dikirim kembali ke PPID Utama sebagai dasar penilaian tingkat keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

SAQ diisi sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga setelah masa pengisian SAQ selesai lalu dilakukan evaluasi SAQ masing – masing PPID Pembantu. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah yang diisi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan (di website PPID Pembantu). Dasar dari pengisian SAQ digunakan untuk menentukan peringkat sebagai dasar dilakukan visitasi ke PPID Pembantu.

Tim visitasi Monev PPID Pembantu Tahun 2021 beranggotakan Kepala Bidang IKP, Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Pranata Humas dan satu orang petugas PPID Utama. Visitasi monitoring dan evaluasi (Monev) PPID Pembantu tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 atau kurang lebih dilaksanakan selama kurun waktu 1 minggu.

Visitasi dilakukan untuk menyampaikan hasil dari evaluasi PPID Utama Kota Madiun kepada PPID Pembantu, mengetahui permasalahan yang ada di tiap – tiap PPID Pembantu sekaligus mencatat saran dan masukan dari PPID Pembantu untuk perbaikan pengembangan pelayanan informasi dan pelaksanaan tugas dan

peranan PPID Utama dan PPID Pembantu sekaligus juga mengetahui sarana dan prasarana pelayanan PPID di tiap unit PPID Pembantu. Setiap hasil dari visitasi dicatat dan didokumentasikan oleh tim Monev PPID sebagai bahan pelaporan dan juga bahan untuk melakukan perbaikan pelayanan khususnya di PPID Kota Madiun.

Hasil visitasi ini juga menjadi bahan masukan bagi PPID Utama Kota Madiun, untuk menentukan bentuk dan model koordinasi maupun pembinaan apa selanjutnya yang dapat difasilitasi oleh PPID Utama Kota Madiun ke PPID Pembantu. Tidak lupa dalam setiap kunjungan, tim monev juga memberikan saran dan masukan yang dapat membantu atau setidaknya menjadi masukan buat PPID Pembantu dalam meningkatkan pelayanan informasi publiknya guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Dari hasil visitasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021 ini, kendala dan permasalahan yang dialami oleh PPID Pembantu sebagian besar masih sama dengan yang ditemui pada Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu tahun sebelumnya, dimana permasalahan tersebut dikarenakan sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM;
2. SDM yang kurang handal khususnya dalam bidang penulisan naskah berita dan IT pengelolaan website;
3. SDM khususnya di tingkat PPID Pembantu Kelurahan banyak yang berganti admin;
4. Manajemen Waktu yang belum tertata baik;
5. Admin yang juga merangkap tugas lainnya;
6. Pergantian admin tanpa adanya proses regenerasi sebelumnya.

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Website PPID Pembantu ini adalah sebagai berikut :

- I. Evaluasi Website berdasarkan terpenuhinya pengisian SAQ :
 - a. PPID Pembantu OPD

Evaluasi Pengisian SAQ PPID Pembantu OPD Kota Madiun Tahun 2021

No	Nama OPD	Kategori	Keterangan
1	Dinas Sosial	Informatif	Lengkap
2	Sekretariat DPRD	Informatif	Lengkap
3	BKAD	Informatif	Lengkap
4	BPBD	Informatif	Lengkap
5	Dinas Perhubungan	Informatif	Lengkap
6	Bagian Umum	Menuju Informatif	Tampilan website lebih menarik lagi dan berita lebih diaktifkan lagi

7	Satpol PP	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik
8	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta)
9	Dispendukcapil	Menuju Informatif	Kurang Informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik
11	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik
12	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan	Menuju Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta)
13	Bakesbangpol	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta)
14	Kecamatan Taman	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, laporan akses informasi publik, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik
15	Bagian Organisasi	Menuju Informatif	Kurang link LHKPN, laporan akses informasi publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta)
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik
17	Bagian Hukum	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), register permohonan informasi publik

18	Bagian Pemerintahan Umum	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa, dokumen perjanjian dengan pihak ke tiga
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Menuju Informatif	Kurang laporan akses informasi publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa, standar pelayanan informasi publik
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, Laporan akses informasi publik, DIP 2021, Informasi Dikecualikan 2021, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta)
22	Kecamatan Kartoharjo	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, program kegiatan anggaran, register permohonan informasi publik, link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, program kegiatan anggaran, laporan akses informasi publik, register permohonan informasi publik, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik
24	Inspektorat	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, program kegiatan anggaran, laporan akses informasi publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), informasi terkait pengadaan barang dan jasa

25	Kecamatan Manguharjo	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi terkait covid-19, register permohonan informasi, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), tampilan website lebih menarik lagi
26	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, program kegiatan anggaran, produk hukum, link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta)
27	Dinas Perdagangan	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), alur pelayanan/ perizinan, laporan akses permohonan informasi publik, link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa
28	PDAM Tirta Taman Sari	Menuju Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, program kegiatan anggaran, laporan PPID, alur pelayanan permohonan informasi
29	Badan Pendapatan Daerah	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa, berita
30	Dinas Lingkungan Hidup	Menuju Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, program kegiatan anggaran, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), tata cara pengaduan, link/ informasi terkait pengadaan barang dan jasa, berita

31	RSUD Kota Madiun	Kurang Informatif	Kurang LHKPN, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, program kegiatan anggaran, DIP, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta), produk hukum, SK admin PPID yang baru
32	Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, berita, standar pelayanan informasi publik, alur permohonan informasi, website ada 2 mohon untuk website https://bankdaerah.madiunkota.go.id/ juga diaktifkan.
33	PD. Aneka Usaha	Kurang Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, program kegiatan anggaran, berita, laporan akses informasi publik, produk hukum, alur permohonan informasi publik, profil pimpinan, DIP
34	Bapelitbangda	Website error (kendala teknis)	
35	Dinas Pendidikan	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ
36	Disbudparpora	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ

b. PPID Pembantu Kelurahan

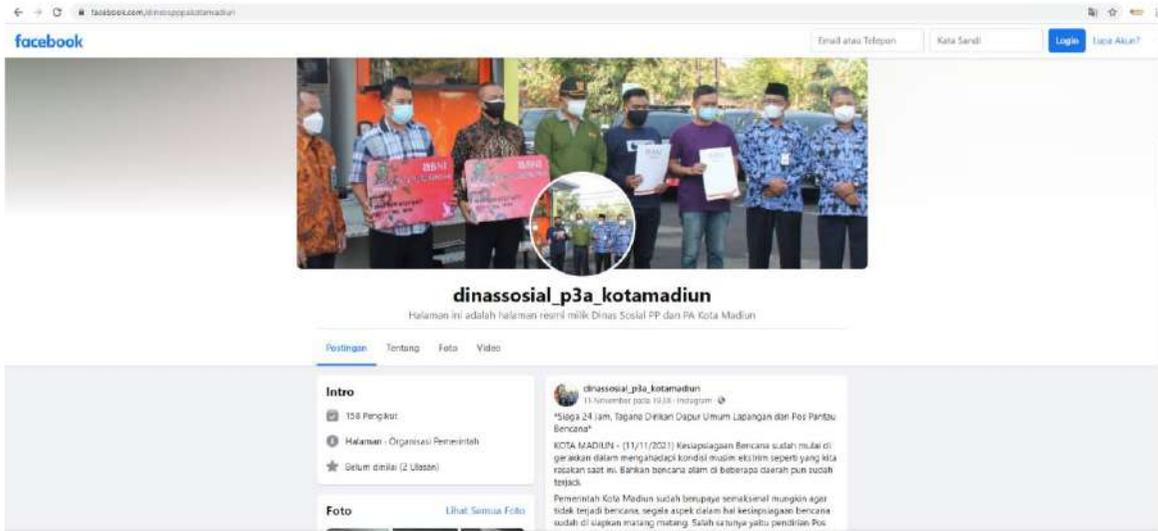
Evaluasi Pengisian SAQ PPID Pembantu Kelurahan Kota Madiun Tahun 2021

No	Nama OPD	Kategori	Keterangan
1	Kelurahan Kanigoro	Informatif	Lengkap
2	Kelurahan Josenan	Informatif	Lengkap
3	Kelurahan Manisrejo	Informatif	Lengkap
4	Kelurahan Pangongangan	Informatif	Lengkap
5	Kelurahan Kartoharjo	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, data penerimaan bantuan sosial
6	Kelurahan Oro-Oro Ombo	Menuju Informatif	Kurang laporan akses informasi publik, standar pelayanan informasi publik, register permohonan informasi publik

7	Kelurahan Kuncen	Menuju Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, data penerimaan bantuan sosial, informasi terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (informasi serta-merta)
8	Kelurahan Pilangbango	Menuju Informatif	Kurang laporan akses informasi publik, data penerima bantuan sosial, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik
9	Kelurahan Klegen	Menuju Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, program kegiatan anggaran
10	Kelurahan Sukosari	Menuju Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, program kegiatan anggaran
11	Kelurahan Demangan	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, DIP, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik
12	Kelurahan Mojorejo	Menuju Informatif	Kurang DIP, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, produk hukum
13	Kelurahan Kejuron	Menuju Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, data penerima bantuan sosial, alur permohonan informasi publik
14	Kelurahan Tawangrejo	Menuju Informatif	Kurang agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi publik, link program kegiatan anggaran, link data penerima bantuan sosial, laporan akses informasi
15	Kelurahan Nambangan Kidul	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi, produk hukum, data penerima bantuan sosial, alur perizinan atau pelayanan, SK admin PPID
16	Kelurahan Winongo	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses

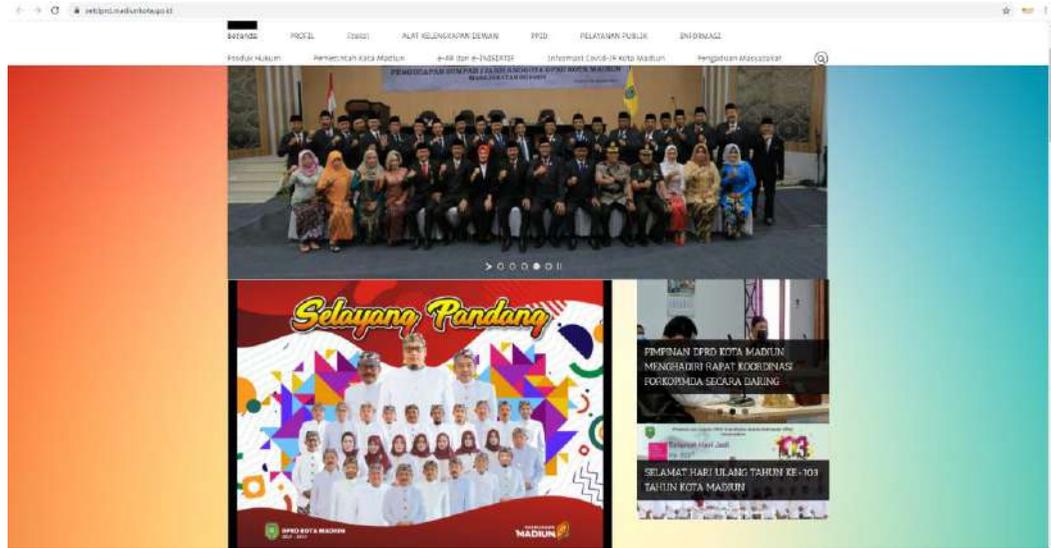
			informasi, produk hukum, alur perizinan atau pelayanan, SK admin PPID, berita
17	Kelurahan Pandean	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi, produk hukum, alur perizinan atau pelayanan, SK admin PPID, berita, data penerima bantuan sosial
18	Kelurahan Patihan	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi, produk hukum, alur perizinan atau pelayanan, SK admin PPID, berita, data penerima bantuan sosial
19	Kelurahan Sogaten	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi, produk hukum, alur perizinan atau pelayanan, SK admin PPID, berita, data penerima bantuan sosial
20	Kelurahan Ngegong	Kurang Informatif	Kurang program kegiatan anggaran, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, laporan akses informasi, produk hukum, alur perizinan atau pelayanan, SK admin PPID, berita, data penerima bantuan sosial
21	Kelurahan Kelun	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ
22	Kelurahan Rejomulyo	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ
23	Kelurahan Banjarejo	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ
24	Kelurahan Madiun Lor	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ
25	Kelurahan Nambangan Lor	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ
26	Kelurahan Manguharjo	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ
27	Kelurahan Taman	Tidak Informatif	Tidak mengumpulkan SAQ

II. Hasil Tangkapan Layar PPID Pembantu 5 Besar Terbaik dari Hasil Penilaian pada Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

No	Nama OPD	Keterangan
1.	Dinas Sosial Kota Madiun	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 

2 Sekretariat
DPRD Kota
Madiun

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



3 BKAD Kota Madiun

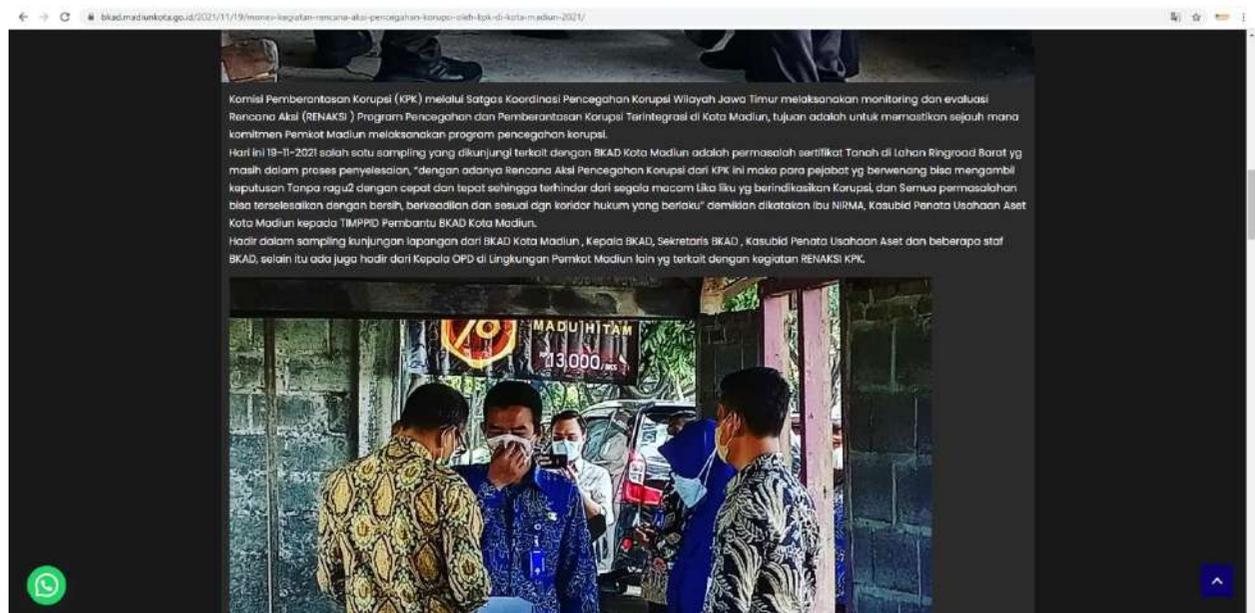
1. Website



2. Media Sosial



3. Berita

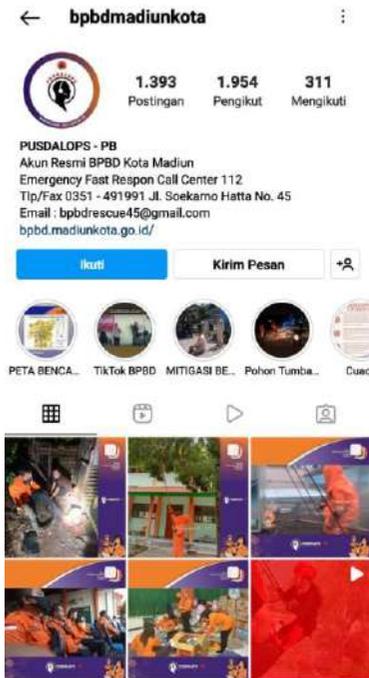


4 BPBD Kota Madiun

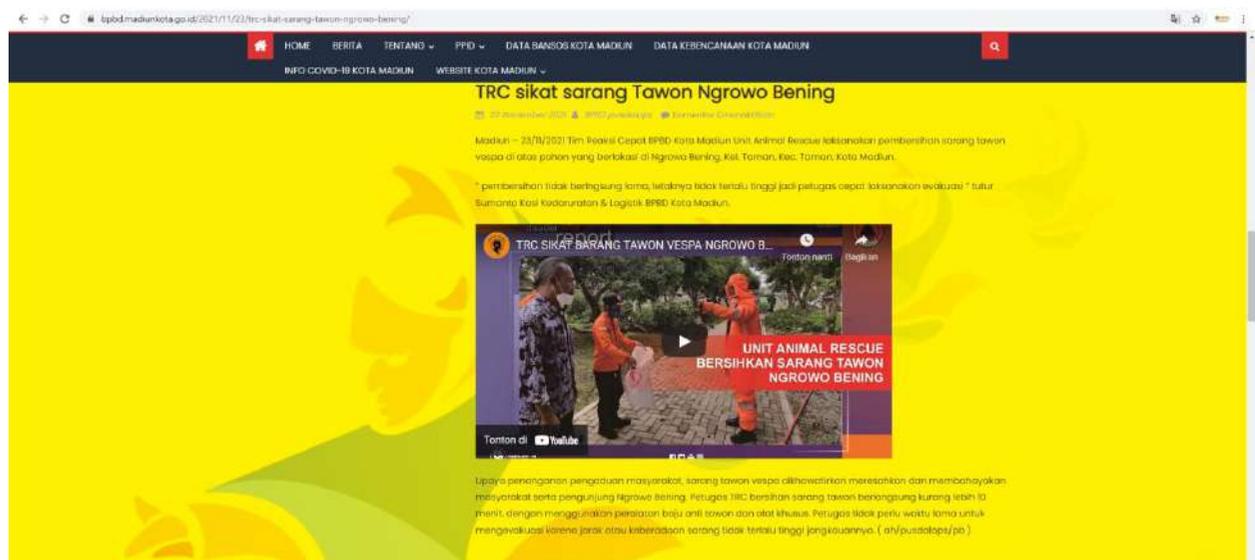
1. Website



2. Media Sosial



3. Berita

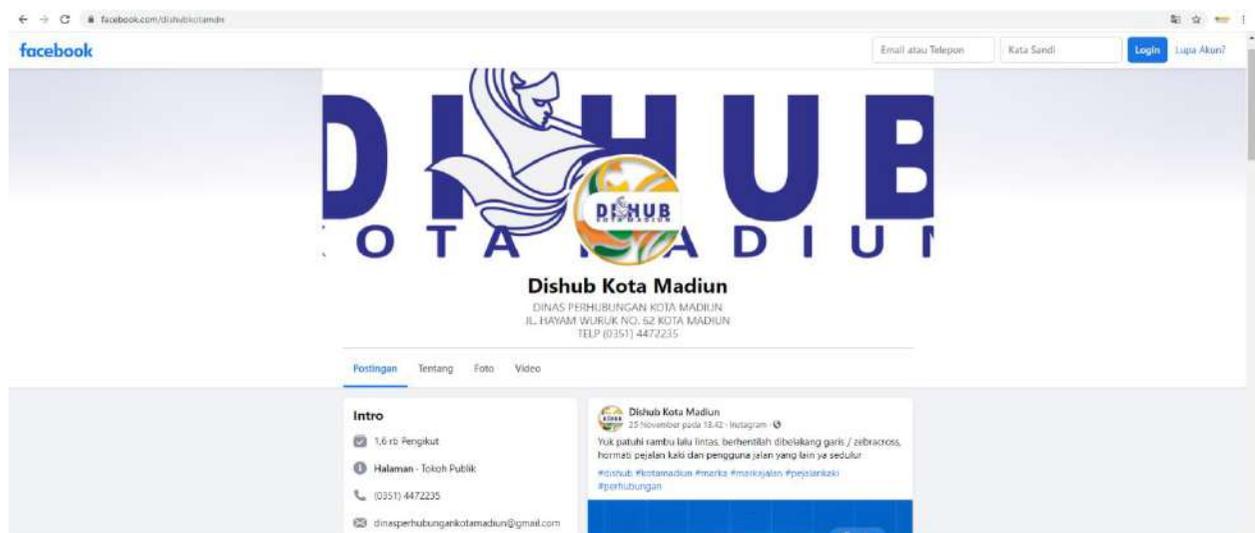


5 Dinas Perhubungan

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita

MADIUN – Salat Isya berjamaah Wali Kota Madiun berlanjut di Pondok Abi Bahrin Madinatul Jannah, Kamis (28/10). Giat tersebut bukan hanya sekadar sarana peningkatan iman dan taqwa. Lebih dari itu juga sebagai silaturahmi dan serap aspirasi masyarakat.

Kesempatan itu juga digunakan Wali Kota Madiun Maidi untuk sosialisasi protokol kesehatan pandemi Covid-19. Seperti giat sebelumnya, jamaah wajib dilakukan rapid antigen sebelum kegiatan.

"Semua kegiatan sudah diizinkan. Tapi syaratnya harus antigen dulu," ungkapnya.

Wali Kota juga mengatakan di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, dijadikan sebagai pengingat dan momentum untuk memanjatkan doa kepada para pendahulu yang telah berjuang mendahului kita.

"Tepat di hari sumpah pemuda ini. Mari kita kirimkan doa untuk para pendahulu yang telah berjuang dan telah mendahului kita. Kita berkewajiban untuk meneruskan semangat ini," jelas wali kota.

Lebih dari itu, Wali Kota juga berpesan agar masyarakat meningkatkan imun dengan berolahraga dan makan-makanan sehat setiap hari. Tak lupa wali kota juga mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

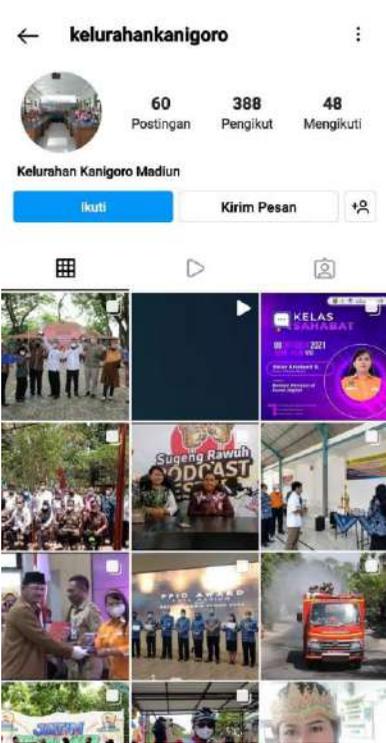
[embedyt]
<https://www.youtube.com/watch?v=8x64txN4MMY>[/embedyt]

ARTIKEL TERBARU

[Aspirasi Pengaduan Masyarakat 2021](#)
November 30, 2021

[Salat Isya di Pondok Abi Bahrin Madinatul Jannah, Wali Kota Pesan Kuatkan Iman dan Imun Dalam Hadapi Covid-19](#)
November 29, 2021

[Senam Bersama Lansia,](#)

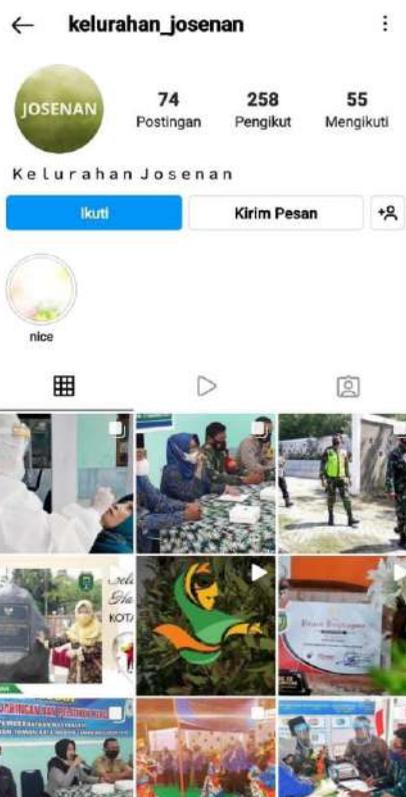
No	Nama Kelurahan	Keterangan
1.	Kelurahan Kanigoro	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 

2 Kelurahan Josenan

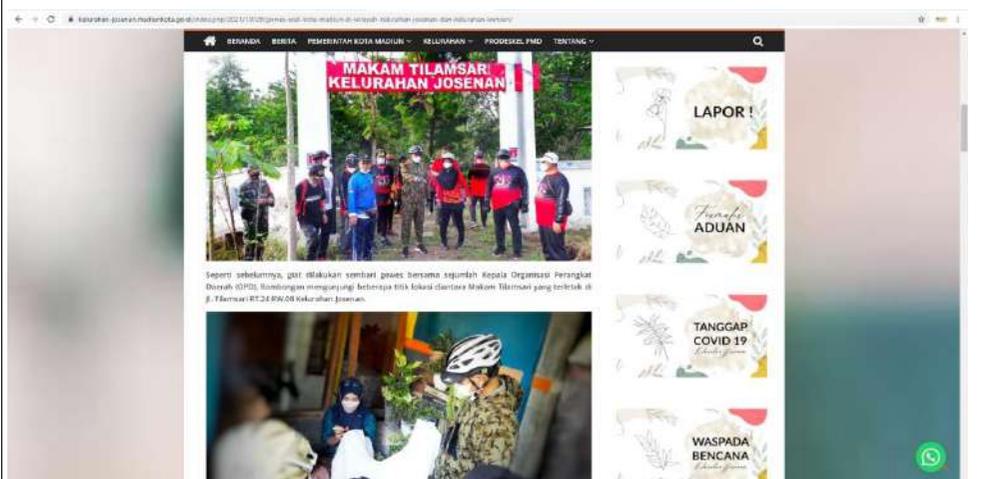
1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



3 Kelurahan Manisrejo

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



4 Kelurahan Pangongangan

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



5 Kelurahan Kartoharjo

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



INFORMASI SETIAP SAAT / KELURAHAN / P/PIID

WALIKOTA MADIUN KE LAPAK SENDANG

September 26, 2021 - by admin

Kegiatan Goes Bapak Walikota dilaksanakan minggu 26 September 2021 untuk berkunjung ke lapak sendang merupakan kehormatan bagi pengurus paguyupan lapak karena di tengah kesibukan bapak Walikota Madiun masih menyempatkan untuk memberi semangat bagi warga sekitar lapak dan pengurus untuk bisa meningkatkan perekonomian warga Kelurahan Kartoharjo. Kegiatan ini dihadiri juga Camat Kartoharjo Lurah Kartoharjo Beserta Kasid dan Staf, Babinsa, Babinkamtibmas dan bersamaan kegiatan rutin senam minggu pagi bersama warga sendang. Pemotongan tumpeng oleh Bapak Walikota diserahkan ke Ketua Paguyupan Lapak Sendang sekaligus dibukanya / di gunakannya Lapak sendang untuk kegiatan warga masyarakat sekaligus untuk menghidupkan/meningkatkan perekonomian UMKM kelurahan Kartoharjo saat pandemi.

BAB III

KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kota Madiun Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui pengumpulan SAQ (*Self Assesment Questionniare*) oleh masing – masing PPID Pembantu baik OPD maupun Kelurahan dan pelaksanaan visitasi (kunjungan) ke PPID pembantu terpilih dapat dilihat tingkat keterbukaan informasi publik di masing – masing PPID Pembantu.

Evaluasi pada tahun 2021 walau penilaian terbesar dari pengisian SAQ oleh PPID Pembantu, tetapi juga dilihat dari beberapa aspek seperti tampilan website, keaktifan admin, dan respon admin dalam menyelesaikan pengaduan.

KEPATUHAN PENGISIAN SAQ

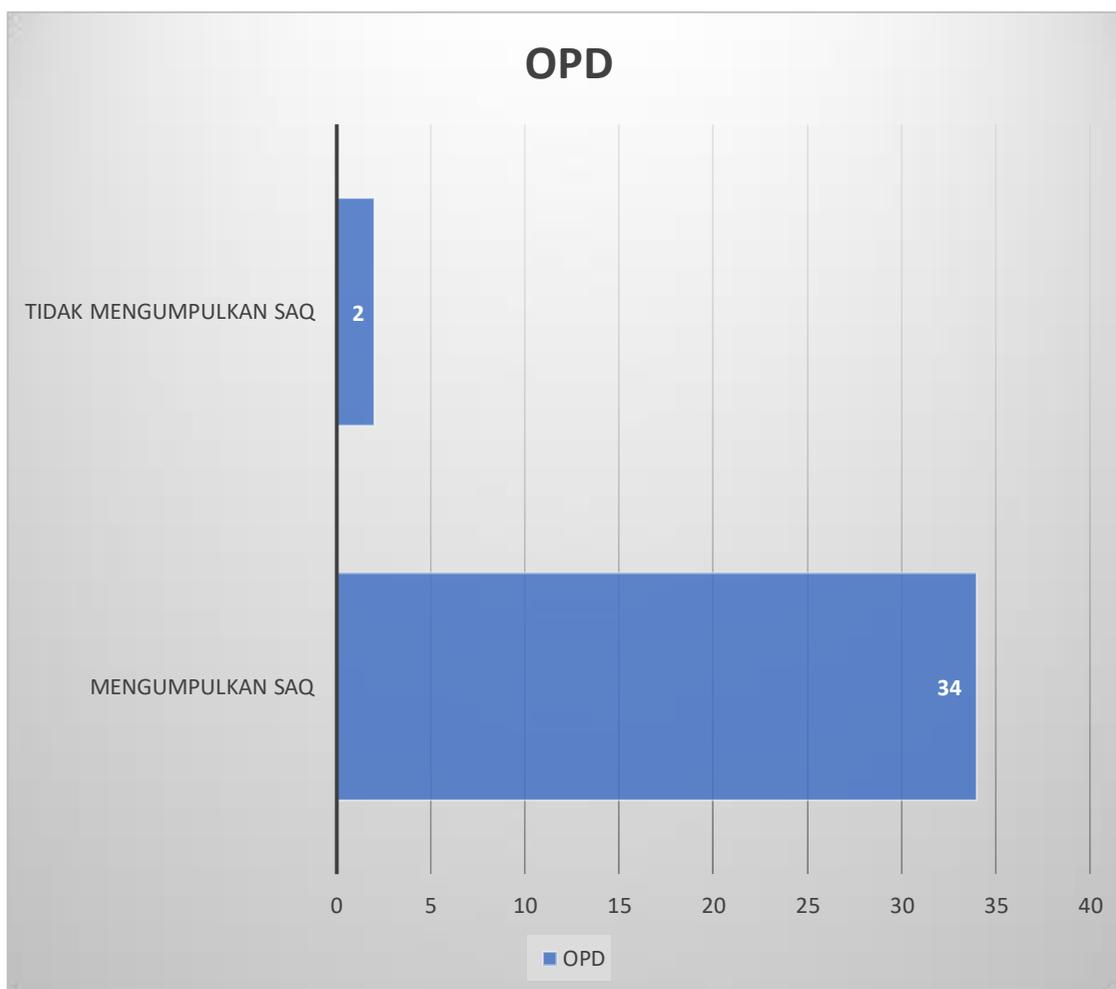


Table 1

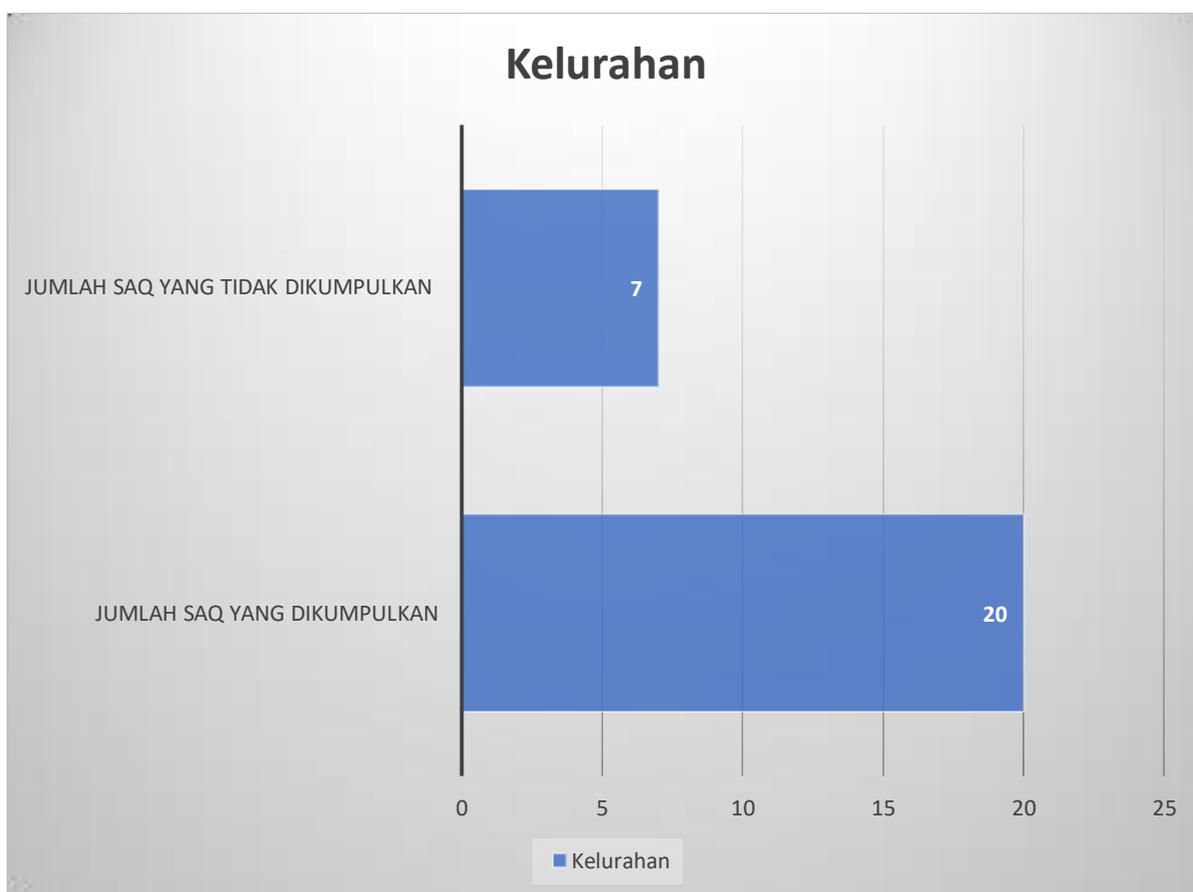


Table 2

Dari data diatas bahwa hasil dari pengumpulan SAQ atas ketersediaan informasi publik PPID Kota Madiun tahun 2021 terdapat 34 PPID Pembantu OPD yang telah mengumpulkan SAQ dari 36 PPID Pembantu OPD. Sehingga didapat hasil tingkat kepatuhan pengisian SAQ PPID Pembantu OPD mencapai nilai 94%. Sedangkan untuk PPID Pembantu Kelurahan yakni ada 20 Kelurahan yang telah mengumpulkan SAQ dari 27 Kelurahan yang ada. Sehingga hasil kepatuhan pengisian SAQ PPID Pembantu Kelurahan ada pada nilai 74%.

Masih adanya beberapa PPID Pembantu kelurahan yang belum mengumpulkan SAQ menunjukkan masih rendahnya perhatian dari PPID Pembantu Kelurahan terhadap keterbukaan informasi publik.

TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dari evaluasi SAQ Monev PPID Pembantu Tahun 2021 diketahui tingkat keterbukaan informasi publik PPID Pembantu di Kota Madiun sebagai berikut :

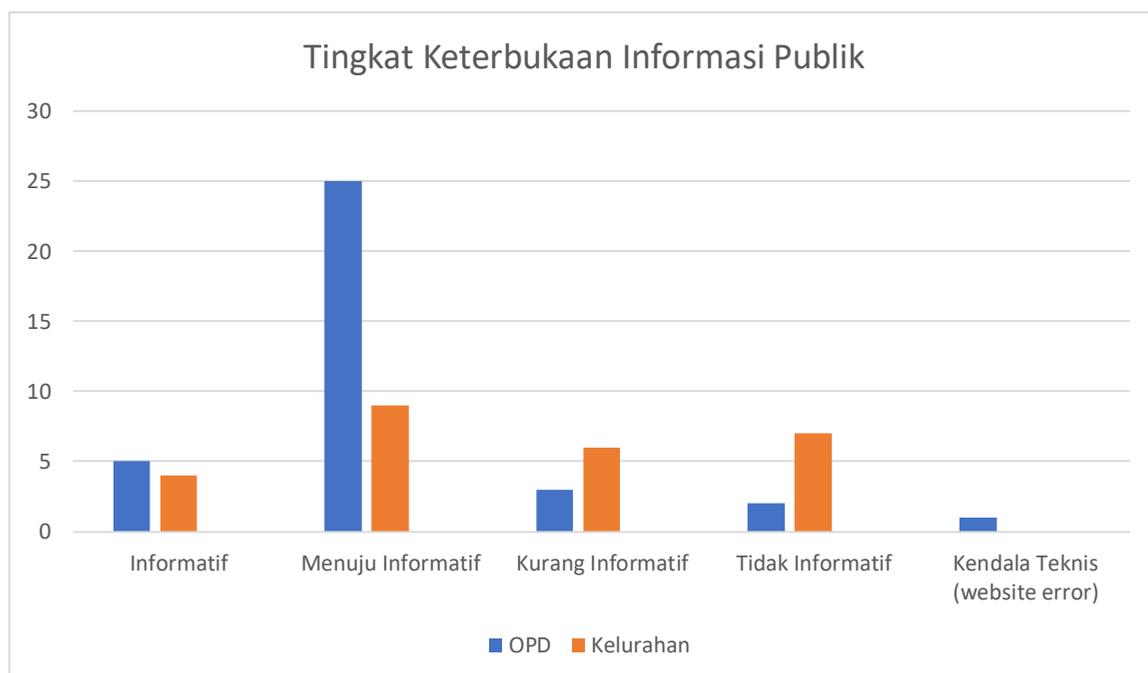


Table 3

Dari hasil table 3 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di OPD yakni ada 5 PPID Pembantu OPD dengan kategori informatif, 25 PPID Pembantu OPD dengan kategori menuju informatif, 3 PPID Pembantu OPD dengan kategori kurang informatif, 2 PPID Pembantu OPD dengan kategori tidak informatif dan 1 PPID Pembantu OPD websitenya *error* (terkendala teknis).

Sedangkan untuk PPID Pembantu Kelurahan dapat dianalisa bahwa terdapat 4 PPID Pembantu Kelurahan dengan kategori informatif, 10 PPID Pembantu Kelurahan dengan kategori menuju informatif, 6 PPID Pembantu Kelurahan dengan kategori kurang informatif dan 7 PPID Pembantu Kelurahan dengan kategori tidak informatif.

Dari hasil analisa evaluasi hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kota Madiun Tahun 2021 dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di PPID Pembantu OPD mencapai nilai 86% sedangkan untuk kelurahan mencapai nilai 52%.

Dari hasil tersebut dapat diketahui rata – rata nilai keterbukaan informasi publik di PPID Pembantu Kota Madiun adalah sebesar 69%.

BAB IV

Lampiran Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Kota Madiun





